



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127,
Telp. (0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselfprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselfprov.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Subbidang di Lingkungan BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan
Dari : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
Nomor : 000.7/00785/BPKAD-I/2026
Tanggal : 09 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Hal : Permintaan Laporan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja per triwulan
Tahun 2026

Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi SAKIP Tahun 2025 atas penerapan akuntabilitas kinerja, diminta kepada Saudara untuk membuat Laporan Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja guna mengetahui progres capaian dan mengoptimalkan Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang disampaikan setiap triwulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Laporan tersebut disampaikan ke Bagian Perencanaan dan Data Informasi (sebagaimana format sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,



Ferri Yanuar, S. KM., M. Kes
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197607132009021002

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)
TRIWULAN II TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP		Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
		a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	-		Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
		- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026						Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
		- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027						
		b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Induk (Budget Execution)	%	5	-	-		Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	-		Nilai Indeks Pengelolaan Aset dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Adapun Indeks Pengelolaan Aset (IPA) BPKAD untuk Tahun Anggaran 2026 secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya (Tahun 2027).

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	-		Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena proses evaluasi dan penilaiannya baru berjalan saat ini (pertengahan tahun 2026)

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
 TRIWULAN II TAHUN 2026

Bagian Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	%	25,96	26,14	100,69	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, penyusunan Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD Adanya kewajiban hukum bagi daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total APBD. Ketentuan ini "memaksa" daerah untuk mengevaluasi kembali struktur belanja mereka agar tidak terkena sanksi penundaan dana Transfer ke Daerah (TKD).	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terealisasi sebesar 26,14%. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Belanja Pegawai daerah termasuk didalamnya ASN, Kepala Daerah dan DPRD. Belanja Pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

2.	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD dan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60	27,52	75,19	Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian Belanja Infrastruktur Proses pengadaan barang dan jasa seringkali baru dimulai di pertengahan tahun. Keterlambatan tender ini mengakibatkan pengerjaan fisik tidak selesai tepat waktu (silpa).	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur dengan capaian 27,52 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 36,60%. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah diundangkan. Terkait pemenuhan Belanja Mandatory Spending, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan: * Meningkatkan kualitas mengelola keuangan belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan; * Melakukan evaluasi sub kegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan mandatory spending seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender
----	---	--	---	-------	-------	-------	---	--

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 198208162001121004

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah



Fetri Aswanti
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197702022000032003

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bagian Anggaran I Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terbinanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Keuangan Organisasi	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina Pengelolaannya	%	100	20	20,00	Kendala Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Perubahan APBD maupun APBD Adanya tarik-ulur kepentingan antara fraksi di DPRD atau antara eksekutif dan legislatif sering memperlama proses pembahasan. Dominasi faktor politik dibandingkan data empiris membuat pembahasan memakan waktu lebih lama.	Persentase Dokumen Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota terutama untuk pemenuhan alokasi minimal 20% pendidikan, 10% kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik minimal 40% terpenuhi sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah diundangkan. Terkait Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina Pengelolaan Keuangannya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan: * Pengawasan Urusan Konkuren: Melakukan reviu dan monitoring terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah agar sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). * Koordinasi Tugas Pembantuan: Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang diberikan pusat ke kabupaten/kota.

TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bagian Anggaran II Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending	Persentase Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Wajib serta Belanja Mandatory Spending	%	100	40	40,00	Kendala Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending sering terjadi Masalah konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), tahunan (RKPD), dan dokumen penganggaran (KUA-PPAS).	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi minimal 20% pendidikan, 10% kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik minimal 40% terpenuhi sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah diundangkan. Terkait pemenuhan Belanja Mandatory Spending, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan:
								* Meningkatkan kualitas mengelola keuangan belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan;

TRIMULAN II TAHUN 2026

Sub Bagian Anggaran III Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

[illegible]

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Bagian Perbendaharaan Daerah

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA	%	2,50	-	-		SILPA Sampai dengan Triwulan II sebesar Rp1.212.239.403.547,20 atau 12,44% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.747.926.839.611,00. Angka ini terus berubah setiap hari mengikuti transaksi keuangan. SILPA Tahun Anggaran (TA) 2026 hanya dapat dihitung secara pasti setelah seluruh transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu tahun penuh berakhir pada 31 Desember 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Febriany, S.E., M. Si., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197602262007012006

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bidang Perbendaharaan I BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	%	100	41,91	41,91	OPD terkadang tidak menjelaskan pencatatan kegiatan menggunakan sumber daya apa.	Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 output yang telah dihasilkan sebanyak 18 Laporan yang terdiri dari 15 laporan (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank), 2 laporan syarat salur DAU, dan 1 Laporan DAK Tahap I Tahun 2026 dengan persentase Capaian 41,91%

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Febriany, S.E., M. Si., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197602262007012006

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I

Arlini Sutisno, S.E., M.M
Pembina /IV.a
NIP. 198508042009032005

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bidang Perbendaharaan III BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Tertindakannya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	Persentase Tertindakannya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	%	100	50	50	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target.	- Realisasi atas Pemotongan SP2D atas Kas Triwulan II Tahun 2026 masih berjalan sesuai dengan rencana

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III

Febriany, S.E., M. Si., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197602262007012006

Andri Geromiko, S.E., M.M
Pembina /IV.a
NIP. 198504282009031006

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bidang Perbendaharaan II BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Persentase Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah secara dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi		%	100	50	50	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target	

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Febriany S.E., M. Si., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197602262007012006

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II

M. Rasyid Ridho, S.T., SP., M.M
Pembina /IV.a
NIP. 198106082010011012

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJUANGAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	Faktor Pendorong Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu : - Adanya komitmen kuat dari kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan pimpinan daerah untuk menyajikan laporan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). - Implementasi SIPD yang terintegrasi mempermudah penginputan, konsolidasi, dan pengolahan data keuangan secara real-time, yang pada akhirnya mempercepat penyusunan laporan keuangan. - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Adanya jadwal internal yang rinci (timeline) untuk setiap tahapan, mulai dari rekonsiliasi data hingga finalisasi laporan, membantu tim bekerja secara terstruktur.	Laporan Keuangan yang disusun merupakan Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Palembang, 2 Juli 2026
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,

Hj. Yune Rosalaini, SE., M. Si, CGCAE
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197406231995032002

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

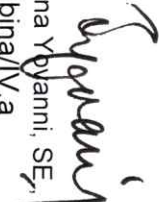
Sub Bidang Akuntansi I Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	Persentase terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	%	100	25	25	- Adanya komitmen kuat dari kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan pimpinan daerah untuk menyajikan laporan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). - Implementasi SIPD yang terintegrasi mempermudah penginputan, konsolidasi, dan pengolahan data keuangan secara real-time, yang pada akhirnya mempercepat penyusunan laporan keuangan. - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Adanya jadwal internal yang rinci (timeline) untuk setiap tahapan, mulai dari rekonsiliasi data hingga finalisasi laporan, membantu tim bekerja secara terstruktur.	Sampai dengan Triwulan II telah menghasilkan output BA Rekon Pajak Daerah, BA Rekon Retribusi Daerah, BA Rekon Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan BA Rekon Transfer, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan persentase Capaian 25%

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah,


Hj. Yune Rosalaini, SE., M. Si, CGCAE
Pembina Tingkat II/IV.b
NIP. 197406231995032002

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Akuntansi I,


Silvana Yulanni, SE, Ak., M. Si
Pembina/IV.a
NIP. 197704022010012011

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bidang Akuntansi II (Belanja) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terbinanya Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah - Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina Pengelolaan Keuangannya	%	100	20	20	Belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target	Sub Bidang Akuntansi II (Belanja) sampai dengan Triwulan II telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Dokumen Kelengkapan Pertanggungjawaban dengan persentase capaian sebesar 20%

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah,


HJ. Yune Rosalaini, SE., M. Si, CGCAE
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197406231995032002

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Akuntansi II (Belanja),


Yulidah, SE., Ak., M. Si
Pembina/IV.a
NIP. 197106232005022004

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bidang Akuntansi III Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	- Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	%	100	92	92	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, penyusunan laporan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Sub Bidang Akuntansi III sampai dengan Triwulan II telah menghasilkan output yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2025 Audited, Laporan Keuangan BLUD, Raperda Pertanggunjawaban, Laporan Hasil Pemeriksaan dengan persentase sebesar 92%

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah,

Hi. Yune Rosalaini, SE., M. Si, CGCAE
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197406231995032002

Palembang, 2 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Akuntansi III,

Riyatno, SE., M. Ak., Ak. CA
Pembina/IV.a
NIP. 197806112009021003

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
		Persentase Penambahan Nilai	%	5	3	60	Faktor Pendorong Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap : - Adanya komitmen kuat dari kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan pimpinan daerah untuk menyajikan laporan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Penyusunan Laporan BMD yang disusun merupakan Laporan BMD Tahun 2025 (Unaudited)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah						- Implementasi SIPD yang terintegrasi mempermudah penginputan, konsolidasi, dan pengolahan data keuangan secara real-time, yang pada akhirnya mempercepat penyusunan laporan barang milik daerah. - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Adanya jadwal internal yang rinci (timeline) untuk setiap tahapan, mulai dari rekonsiliasi BMD dalam rangka Penyusunan Laporan BMD hingga finalisasi laporan, membantu tim bekerja secara terstruktur. - Tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain dalam Penyusunan RKBMD, Pengawasan BMD dan Penerbitan/Pengamanan BMD - Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi BMD Tahunan dan Semesteran dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dalam pencapaian target, penyusunan laporan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan - Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD dan Pemanfaatan BMD berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang berlaku	Bagian Pengelolaan BMD sampai dengan Triwulan I dengan output yang telah dihasilkan Laporan yaitu Kerjasama dengan Kejati Sumsel (dalam hal Pengamanan Aset), BPN Kota Palembang (dalam hal percepatan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel), DJKN (dalam hal penilaian BMD Pemprov. Sumsel dan SK Gubernur yang telah terbit diantaranya terkait Hibah, Sewa Menyewa, Pinjam Pakai, SK Gubernur Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang BMD dan Penghapusan BMD dengan persentase capaian sebesar 30%

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 198208162001121004

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dante Rama Surya, SE., MM., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197808102011011002

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Subbid. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terwujudnya Dokumen Pemanfaatan dan Pemindahantanganan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Pemanfaatan dan Pemindahantanganan Barang Milik Daerah	%	60	43	71,67	Belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target	Subbid Pemanfaatan Barang Milik Daerah sampai dengan Triwulan I dengan output yang telah dihasilkan sebanyak 20 Laporan yaitu dengan persentase capaian sebesar 71,67%

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Dante Rama Surya, SE., MM, CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197808102011011002

Palembang, 02 Juli 2026
Kasubbag. Pemanfaatan BMD

Ade Kuniawan, S. STP., M. A. P
Penata Tingkat I/III.d
NIP. 199211082016091001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bidang Penatausahaan BMD BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah, Inventarisasi, dan laporan Belanja Modal yang Akuntabel	- Persentase Terwujudnya Dokumen Penatausahaan Barang Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100	Aplikasi SIPD E-BMD terdapat data yang mengalami Kendala	Laporan Keuangan BMD dan CALK <i>Audited</i>
			%	100	4	10		Dokumen Penghapusan yang telah selesai sebanyak 4 OPD
		- Persentase Dokumen Inventarisasi Barang Milik daerah yang Akuntabel	%	100	-	-		Kegiatan Inventarisasi BMD belum dilaksanakan
		- Persentase Penertiban dan laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	35	87,50		SK Penetapan Status Belanja Modal yang telah selesai sebanyak 35 OPD

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,


Dante Rama Surya, SE., MM, CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197808102011011002

Palembang, 02 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD,


Alen Agustin, SE., M. Si
Pembina /IV.a
NIP. 198008212009012004

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penertiban dan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang akuntabel	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah - Tersusunnya Dokumen Penertiban Barang Milik Daerah - Persentase Tersusunnya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	% % %	100 100 100	100 50 0	100 50 0	- Proses penertiban memerlukan kerja tim dan proses litigasi memerlukan waktu yang cukup lama Kendala, belum terbentuknya Tim Pengawasan BMD yang telah dilakukan kontrak perikatan pemanfaatan	Terlaksana

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Dante Rama Surya, SE., MM, CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197808102011011002

Palembang, 2 Juli 2026
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD,

Ahadim Effendi, S.H
Penata Tingkat I/III.d
NIP. 197802051997031001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Terlaksananya Tata Kelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Persentase pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	48	48	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target	
		- Tingkat Implementasi E-Sakip Perangkat Daerah	%	100	50	50	Tidak ada kendala dalam penyusunan dokumen SAKIP sebagai dasar penilaian SAKIP	Belum ada hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun 2025

Palembang, 01 Juli 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Sekretaris,



Ferri Yanuar, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197607132009021002

Paraf Hierarki	
Kasubdag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Bagian Perencanaan dan Data Informasi Sekretariat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	50	50	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, laporan penyusunan laporan disesuikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Bagian Perencanaan dan Data Informasi sampai dengan Triwulan II dengan output yang telah dihasilkan sebanyak 11 Laporan yaitu Peta Resiko, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Buku Revisi RKAP Perkada, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Pemantauan Renaksi Kinerja dengan persentase capaian sebesar 50%

Sekretaris Badan,

Ferri Yanuar, S.K.M., M.Kes
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197607132009021002

Palembang, 01 Juli 2026
Kasubag. Perencanaan dan Data Informasi,

Lanri Stia Agustoni,
Pembina/IV.a
NIP. 198208082007011016

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	33.09	33.09	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, penyusunan laporan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset sampai dengan Triwulan II telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Unaudited BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, membuat Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran vs Laporan Operasional Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dengan persentase capaian sebesar 33.09%

Sekretaris Badan,

Ferri Yanuar, S.K.M., M.Kes
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197607132009021002

Palembang, 6 Juli 2026
Kasubag. Keuangan dan Aset,

Rommy Suhaimy, S.Kom., M.Si.
Penata Tk.I/III.d
NIP. 198601312011011004

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	- Persentase Terpenuhi nya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan	%	100	-	-	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan II telah memproses Cuti Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Pesun Pegawai dan Audit Kearsipan
2.	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat daerah	- Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Yang Terpenuhi	%	100	-	-		RKBMD, KIB dan KIR pada Setiap Bidang
		- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Kebutuhan	%	100	-	-		Pengadaan Kendaraan Dinas dengan sistem sewa, Gedung Kantor dan Rumah Dinas, serta Sarana dan Prasarana Gedung dan Rumah Dinas
3.	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhi nya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Baik	%	100	-	-		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sebesar 45%, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sebesar 33,39% dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Sebesar 25,87%
4.	Terlaksananya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	- Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	%	100	-	-		Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar 19,92%, Logistik 46,24%, Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Sebesar 23,22%
								Jasa Komunikasi Internet, Air dan Listrik Sebesar 35,02%

Sekretaris Badan,

Ferri Yanuar, S.K.M., M.Kes
Pembina Tk I / IV/b
NIP. 197607132009021002

Palembang, 02 Juli 2026
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Muhammad Tito, S.H
Penata Tk I / III/d
NIP. 198209172015021001